

**PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PRIORITAS PENGGUNAAN DANA
DESA DI DAERAH TERTINGGAL DI TENGAH PANDEMI COVID 19**

Ro'is Alfauzi

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
alfauzirois21@gmail.com

Abstract : *Village communities in improving the development aspects, and empowering communities in the village. During the outbreak of the COVID 19 virus pandemic, the village minister has a concept of the latest regulation, namely Permendes (village minister regulation) Development of Disadvantaged Areas and Transmigration Number 6 of 2020 concerning Amendments to the Regulation of the Village Minister for Disadvantaged Areas and Transmigration Number 11 of 2019 concerning Priority for the Use of Village Funds in 2020 it specifically contains the allocation of village funds as handling of the COVID 19 pandemic and other non-natural disasters, especially in underdeveloped areas or underdeveloped villages, so that the village government in allocating funds can be directly monitored by the community from the level of responsibility and the point of view of its authority.*

Keywords: *Accountability, Village Minister Regulation, COVID 19 Virus, Disadvantaged Areas*

Abstrak: Pertanggungjawaban atas prioritas dana desa yaitu melibatkan pemerintahan desa dan masyarakat desa dalam peningkatan segi pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di desa. Ditengah maraknya pandemi virus Covid 19 ini Menteri desa mempunyai konsep regulasi terbaru yaitu Permendes (Peraturan menteri desa) Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 isinya khusus memuat pengalokasian dana desa sebagai penanganan pandemi virus covid 19 dan bencana non alam lainnya, khususnya di daerah tertinggal atau desa tertinggal, sehingga pemerintah desa dalam pengalokasian dana dapat diawasi oleh masyarakat secara langsung dari tingkat pertanggungjawabannya dan dari segi kewenangannya.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Peraturan Menteri Desa, Virus Covid 19, Daerah Tertinggal

I. PENDAHULUAN

Negara kesatuan RI merupakan negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang berbatas dan hak haknya ditetapkan dengan undang undang. Negara kesatuan Indonesia telah memilih wilayah hukumnya sendiri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Sebagai negara kesatuan yang

*Ro'is AlFauzi:
Pertanggungjawaban Atas Prioritas Penggunaan Dana Desa di Daerah
Tertinggal di Tengah Pandemi Covid 19*

berkarakteristik kepulauan Indonesia dan menganut suatu asas desentralisasi, jadi kepada daerah diberikan kekuasaan dan kesempatan untuk mengatur, mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebutan daerah otonom. Dalam UUD' 45 yaitu Pasal 18 ayat 1 mengatur bahwa negara kesatuan republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah.¹

Pemberian otonomi daerah yang seluas-luasnya merupakan pemberian kekuasaan dan kewenangan ke daerah untuk mengelola, dan memanfaatkan sumberdaya alam yang secara efektif sehingga tidak terjadi penyelewengan dan penyimpangan. Dalam memberikan sebuah wewenang maka harus diikuti dengan adanya sebuah pengawasan yang kuat. Menurut UU No 23 Tahun 2014 yaitu tentang pemerintahan daerah, bentuk dari wilayah pemerintahan itu adalah kecamatan, kelurahan atau desa yang letaknya di wilayah pemerintahan kabupaten atau kota.² Desa adalah hal pertama yang menjadi tujuan pemerintah dalam mengawali perbaikan ekonomi, sehingga pemerintah menerbitkan regulasi tentang alokasi dana desa. Dana desa ialah penerimaan desa dari pemerintah daerah kabupaten atau kota dalam mengatasi upaya dari pemerataan skala bawah. Jadi dengan adanya dan tersebut pertumbuhan dalam bidang apapun akan dapat terbagi secara merata.

Kebanyakan dana yang digunakan dalam segi pembangunan relatif terbatas dan sedangkan proyek untuk pembangunan yang akan dibutuhkan relatif banyak, sehingga harus dilakukan upaya dalam peningkatan partisipasi masyarakat sebagai penunjang kelangsungan segi pembangunan. Berdasarkan data dari Kementerian Desa, penyaluran dana untuk desa tahun 2015 yaitu Rp. 20,67 Triliun dengan serapan dan sekitar 82,72%, tahun 2016 yaitu Rp. 49.98 Triliun dengan serapan sekitar 97,65%, tahun 2017 yaitu Rp. 60 Triliun dengan serapan sekitar 98,54%, tahun 2018 yaitu Rp. 60 Triliun dengan serapan 99%. Kementerian Desa telah menyatakan bahwa anggaran dana untuk desa naik pada tahun 2019 yaitu Rp. 13 Triliun dan menjadi Rp. 73 Triliun dari sebelumnya yaitu Rp. 60 triliun. Di tahun 2020 dana desa cair sebesar Rp. 332,4 miliar, dengan realisasi meningkat sangat tipis dibandingkan dengan periode yang sama yaitu

*Ro'is AlFauzi:
Pertanggungjawaban Atas Prioritas Penggunaan Dana Desa di Daerah
Tertinggal di Tengah Pandemi Covid 19*

tahun lalu sebesar Rp. 315,9 miliar, kementerian keuangan menyebutkan bahwa adanya kenaikan penyaluran dana menunjukkan adanya suatu perbaikan mengenai skema penyaluran dana desa tahap awal yaitu 40%, dan adanya peningkatan ini merupakan hasil upaya pemahaman oleh aparat desa terhadap pengelolaan dana untuk desa.³

Badan statistik hasil potensi desa tahun 2018 mencatat hasil banyaknya desa tertinggal namun dalam hal ini mengalami penurunan yaitu sekitar 6.518 desa dari 19750 desa yang tertinggal pada tahun 2014 berubah menjadi 13.232 desa tertinggal ditahun 2018, kementerian desa pada tahun 2019 mengentaskan 5000 desa tertinggal dan pada tahun 2020 menargetkan untuk berhasil mengentaskan 10.000 desa tertinggal. Hingga saat ini pemanfaatan dana desa digunakan untuk pembangunan infrastruktur misalnya sanitasi di desa tertinggal, tapi untuk tergolong desa tertinggal jumlahnya sangat signifikan yaitu desa sangat tertinggal berjumlah 6000 desa dan desa tertinggal 20.000 desa dengan total hingga 27.000 desa.⁴

Berdasarkan Permendes pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 6 tahun 2020 yaitu desa tertinggal adalah desa yang memiliki potensi sumberdaya ekonomi, sosial dan ekologi tetapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.⁵

Penggunaan terhadap dana desa dapat digolongkan dari tipologi desa dan tingkatan perkembangan kemajuan desa. Ditengah maraknya bencana non alam yang disebut dengan pandemi Covid 19 diseluruh dunia., kementerian desa membuat regulasi terbaru dengan menyesuaikan keadaan dan peningkatan jumlah kebutuhan dana yang awalnya dana tersebut terprioritas sebagai pemberdayaan, pembangunan dan perkembangan akan tetapi mulai saat ini dibagi menjadi skala besar untuk penanggulangan bencana yang berupa 1) pandemi Covid 19, 2) Flu burung, 3) penyakit kolera atau penyakit menular yang lainnya.

Semakin tingginya jumlah korban pandemi Covid 19 berdampak serius terhadap hilangnya pekerjaan dari kalangan atas hingga kalangan bawah, karena banyak tempat kerja menutup usahanya dan mem-phk pegawai demi mengikuti

Ro'is AlFauzi:
Pertanggungjawaban Atas Prioritas Penggunaan Dana Desa di Daerah Tertinggal di Tengah Pandemi Covid 19

protokol kesehatan keamanan dari pemerintah, sehingga keadaan ekonomi tidak stabil, membuat masyarakat kalang kabut untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Beruntung bagi masyarakat yang berada di desa, karena dana desa sudah dibagi berdasarkan skalanya untuk penanganan krisis bencana alam dan bencana non alam. Akan tetapi tidak semua daerah memakai kucuran dana untuk penanggulangan bencana sebab di daerah tertinggal masih banyak kekurangan yang belum terselesaikan seperti pembangunan dan pengembangan sumber daya.

Berdasarkan pasal 8A ayat 2 dan 3 Permendes pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi no 6 tahun 2020 menyebutkan bahwa bahwa penanganan dampak pandemi covid 19 sebagaimana ayat 1 dapat berupa Bantuan langsung tunai dana desa kepada keluarga miskin di desa sesuai ketentuan peraturan perundang undangan dan yang menerima Bantuan Langsung Tunai dana desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum pernah terdata menerima Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai, dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga rentan sakit menahun atau kronis

Dampak adanya wabah bencana non alam ini kadang memberi dampak baik kadang juga memberi dampak buruk terhadap tatanan ekonomi, untuk dampak baiknya bagi masyarakat umum dapat menikmati hasil dari penyaluran dana berupa bantuan sosial dan untuk dampak buruknya bagi masyarakat daerah tertinggal harus dapat memahami penggunaan dana tersebut sebagai pembangunan, pemberdayaan dan bencana, sehingga aparat desa sebagai perantara pemerintah dapat benar-benar mempertanggungjawabkan penggunaannya.

II. PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Dana Desa

Dana desa merupakan dana yang berasal dari APBN, dana tersebut akan diperuntukkan bagi desa ditransfer melalui APBD kabupaten atau kota sebagai pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, pemberdayaan masyarakat desa dan pembangunan.⁶ Sesuai Undang undang Nomor 6 tahun 2014 yaitu tentang desa,

Ro'is AlFauzi:
Pertanggungjawaban Atas Prioritas Penggunaan Dana Desa di Daerah
Tertinggal di Tengah Pandemi Covid 19

bahwasannya para pemerintah dalam pengalokasian dana desa yaitu dengan mekanisme transfer ke daerah kabupaten atau kota.

Berdasarkan pengalokasian tersebut maka setiap kabupaten atau kota berhak wajib mengalokasikan dana ke setiap desa dengan berdasarkan jumlah desa atau kelurahan dan wajib memperhatikan hasil jumlah penduduk kabupaten atau kota (30%), dengan luas wilayah kabupaten atau kota (20%), dan melihat angka kesmiskinan daerah kabupaten atau kota (50%). Dari hasil perhitungan itu juga akan disesuaikan berdasarkan tingkatan kesulitan geografis masing masing dari desa, dari besarkn pengalokasian anggaran ditentukan 10% diluar dana transfer daerah yang secara bertahap dilakukan oleh pemerintah melalui Rekening Kas Umum Negara ke pemerintah daerah kabupaten atau kota dengan melalui Rekening Kas Umum Daerah. Pengalokasian dana desa wajib dilaksanakan dengan mengikut pedoman prinsip prinsip yaitu kebutuhan prioritas, keadilan, kewenangan desa, partisipatif, swakelola dengan basis sumber daya dari desa dan tipologi desa.

B. Wewenang Pemerintah Desa dalam Mengelola Dana Desa di Tengah Pandemi

Setiap bertindak pemerintah juga harus dapat bertumpu terhadap kewenangan yang sah, kewenangan dapat diperoleh berdasarkan 3 sumber, yaitu atribusi, delegasi dan mandat adalah kewenangan yang asalnya berdasarkan dari pelimpahan.⁷ Secara teori, ketiga kewenangan yang diperoleh dari peraturan perundang undangan menurut H.D. Van Wijk Koninjen yaitu dapat dijabarkan sebagaimana berikut:

1. Atribusi merupakan pemberian wewenang pemerintah, oleh pembuat undang undang kepada organ pemerintah
2. Delegasi merupakan pelimpahan terhadap wewenang pemerintah yang berasal dari satu organ pemerintah terhadap organ pemerintah yang lain.
3. Mandat yaitu akan terjadi jika organ pemerintah dapat mengizinkan kewenangannya untuk dijalankan oleh orang lain atas nama-nya.

*Ro'is AlFauzi:
Pertanggungjawaban Atas Prioritas Penggunaan Dana Desa di Daerah
Tertinggal di Tengah Pandemi Covid 19*

Sumber kewenangan atribusi dalam istilah belanda *attribute van wegeving bevoegheid* adalah pemberian wewenang untuk membentuk suatu peraturan perundang undangan yang telah diberikan oleh *groundwer/wet* kepada lembaga negara. Kewenangan itu dapat terus menerus dilaksanakan atas prakarsa sendiri disetiap waktu yang diperlukan. Adapun sumber kewenangan yang lain berasal dari delegasi yaitu suatu pelimpahan kewenangan yang membentuk peraturan perundang undangan, kemudian dilakukan oleh per-undang undangan yang lebih tinggi terhadap pertauran per-undang undangan yang lebih rendah, baik dengan pelimpahan yang dinyatakan secara tegas maupun tidak.⁸

Pemegang kekuasaan pengalokasian keuangan desa, dapat disingkat PKPKD yaitu kepala desa dengan sebutan nama lain yang karena dalam jabatannya mempunyai sebuah kewenangan untuk meyelenggarakan seluruh kelola keuangan desa. Kades secara atribusi diberikan sebuah kewenangan dalam pengelolaan keuangan desa yaitu meliputi pengelolaan dana desa, dan kewenangan tersebut selanjutnya akan diteruskan kepada perangkat desa yang sudah ditunjuk sebagai pembantu pelaksanaan pengelolaan keuangan desa didalam tim PTPKD, ini merupakan sebuah unsur dari perangkat desa, semua mencakup sekretaris desa, kepala deksi dan bendahara.⁹

Selain memberi kepastian adanya jaminan berdasar hak asal dan usulnya, negara memberikan adanya jaminan kewenangan lokal yang sifatnya skala desa. Kewenangan lokal yang berskala desa ialah kewenangan yang berguna untuk mengatur dan mengurus suatu kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa sehingga mampu, efektif dijalankan oleh pihak karsa masyarakat desa.¹⁰ Pelaksanaan dari kewenangan ini telah diatur dan diurus oleh pihak desa. Kewenangan tersebut telah diatur didalam pasal 5 (BAB III) UU No 6 Tahun 2014 dimana kriteria dalam kewenangan lokal skala desa meliputi;

1. Kewenangan yang dalam pengutamaannya meliputi kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
2. Kewenangan yang mempunyai ruang lingkup adanya pengaturan dan kegiatan yang hanya berada didalam wilayah, dan masyarakat yang mempunyai dampak terhadap internal desa

Pertanggungjawaban Atas Prioritas Penggunaan Dana Desa di Daerah Tertinggal di Tengah Pandemi Covid 19

3. Kewenangan yang ada kaitannya dengan adanya kebutuhan kepentingan sehari-hari masyarakat desa
4. Kegiatan yang telah berjalan dan dijalankan oleh prakarsa desa.
5. Program kegiatan dari pemerintah, Provinsi, dan kabupaten atau kota, pihak ketiga yang telah diserahkan dan telah dikelola oleh pihak desa.
6. Kewenangan lokal berskala desa yang telah diatur oleh suatu perundang-undangan mengenai pembagian kewenangan pemerintah, provinsi, dan pemerintahan kabupaten atau kota.

Idealnya, pada tiap-tiap desa telah memiliki peraturan desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa, disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Namun secara realita masih banyak pemerintah daerah kabupaten atau kota yang belum memberikan ketetapan peraturan tentang daftar kewenangan yang berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.

Luasnya suatu kewenangan pemerintah desa, tidak adanya pengawasan yang kuat BPD dan dapat membuka peluang korupsi di desa yang disebabkan oleh sumberdaya aparatur pemerintahannya minim. Jika pemerintahan telah lalai dalam melakukan pengawasan dan pembinaan sebagaimana amanat dari UU Desa. Secara pandang sejarah bakat terhadap feodalisme pemerintahan desa yaitu produk kolonial yang masih cenderung berorientasi terhadap kepentingan majikan atau tuannya dari pada kepentingan masyarakat itu sendiri. Dengan berpedoman pada prinsip kewenangan yang luas juga ditambah dengan sifat monopolistik, jika dapat dijalankan dengan tanpa akuntabilitas pemerintahan desa maka tidak mustahil dapat terjebak masalah penyalahgunaan "abuse of power" seperti halnya melakukan korupsi.¹¹

Hal lain yang perlu juga dikawal adalah terkait dengan kewenangan skala lokal selain kewenangan berdasar asal-usul dan kewenangan yang dibantu oleh pemerintah daerah, provinsi, dan pusat yang harus dijabarkan dalam kerangka kerja perasional untuk menjawab amanat UU Desa didalam bentuk peraturan pemerintahan desa yaitu melakukan pembangunan desa yang berbasis pembinaan dan pemberdayaan masyarakat utamanya persoalan yang berkaitan dengan hajat

Ro'is AlFauzi:
Pertanggungjawaban Atas Prioritas Penggunaan Dana Desa di Daerah Tertinggal di Tengah Pandemi Covid 19

hidup warga miskin, kecenderungan yang ada tidak jarang ditemui pembangunan yang ada di desa lebih banyak pembangunan fisik infrastruktur yang tidak terintegasi dengan pembangunan sosial ekonomi masyarakat.

Dalam merencanakan pembangunan oleh satuan kerja pemerintah tidak diperbolehkan mengambil alih kewenangan pemerintahan desa, seperti dalam pengelolaan dana desa dari pemerintah. Pemerintah sebagai perantara untuk menyampaikan masuknya dana desa ke desa harus memperhatikan wewenangnya, tidak bisa pemerintah dengan semauanya mempersikan dana tersebut sebagai kekayaan pribadi. Ditengah pendemi Covid 19, dana desa telah terpersi dalam tatanan Peraturan menteri desa, dengan adanya dana ini di maksudkan agar pembagian dana tersebut dapat dipertanggungjawabkan, sehingga di daerah tertinggal juga dapat terpenuhi secara maksimal, tidak hanya dalam masalah segi pembangunan, pengembangan dan pemberdayaan. Pihak dari pemerintahan desa tidak perlu merasa khawatir atas pembagian dana tersebut, semenjak adanya permendes pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi direvisi untuk pembaruan, semua sudah diberikan pos masing-masing guna memaksimalkan kebutuhan masyarakat desa.

Daerah tertinggal dibagi berdasarkan suatu wilayah yaitu provinsi, kabupaten atau kota dan desa atau kelurahan, didalam pembagian kewilayahan lebih condong terhadap desa dan mengutamakan pengalokasian dana. Desa tertinggal sangat butuh perhatian khusus pemerintah, karena tidak semua warganya dapat memenuhi kebutuhan ekonominya, kadang masih tergantung dengan dana pemberian dari pemerintah meski warga desa di daerah tertinggal yang kesehariannya mayoritas sebagai petani dan pekebun.

Pemanfaatan hasil pertanian dan perkebunan dimaksudkan warga agar tidak tergantung oleh dana bantuan dari pemerintah, sebab tidak semua warga mendapat bantuan, menurut permendes pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi bantuan untuk masalah pelik yang telah dihadapi masyarakat sekarang bukanlah bencana alam biasa, akan tetapi bencana yang sangat serius harus ditangani bersama, pasal 8A ayat 2 menetapkan bahwa bantuan tersebut berupa pemberian BLT bagi keluarga miskin yang telah didata oleh pemerintah

Ro'is AlFauzi:
Pertanggungjawaban Atas Prioritas Penggunaan Dana Desa di Daerah Tertinggal di Tengah Pandemi Covid 19

desa, Program Keluarga Harapan yang berupa sembako, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan kartu pra kerja bagi keluarga yang belum mendapatkan pekerjaan.

C. Prosedur Tata Kelola Keuangan Desa

Pengalokasian keuangan desa dijelaskan secara detail didalam UU No 6 Tahun 2014 tentang desa, undang undang tersebut menjelaskan mengenai keuangan desa yaitu semua hak dan kewajiban desa yang semuanya dapat ternilai dengan uang, serta sesuatu yang berupa uang atau barang yang semua berhubungan dengan adanya pelaksanaan mengenai hak dan kewajiban desa pasal 71 UU Desa. Hak dan kewajiban tersebut memberikan hasil berupa pendapatan belanja serta pembiayaan yang harus diatur dalam pengelolaan uang desa yang diantaranya meliputi 1) proses perencanaan, 2) penganggaran, 3) pelaksanaan, 4) penatusahaan, 5) pelaporan dan pertanggungjawaban.

Dengan terbantunya proses penggunaan perodesasi yaitu satu tahun anggaran yang hitungannya dimulai dari tanggal 1 Januari-31 Desember. Pada tiap tahapan proses pengelolaan keuangan desa mempunyai aturan yang harus dipahami dan juga dilaksanakan berdasarkan batasan waktu yang telah ditentukan sebelumnya.¹²

Dalam pengembangan tugas kewenangan hak dan kewajiban pengelolaan keuangan desa, dalam hal ini seorang kepala desa juga memiliki atas kewajiban untuk menyampaikan laporan yang sifatnya periodik serta tahunan, yang telah disampaikan oleh bupati atau walikota dan BPD, RKPD atau perencanaan kerja. Pemerintahan desa adalah penjabaran terhadap perencanaan pembangunan jangka menengah untuk jangka dalam waktu satu tahun. Dalam aktivitas pengelolaan uang desa dapat dilakukan dengan sebaik mungkin tentunya juga harus didukung oleh SDM yang berkompeten serta mempunyai kualitas dan prosedur keuangan yang memadai. Oleh krena itu pemerintah desa wajib memiliki struktur organisasi dalam pengelolaan keuangan, bagian alir, uraian tugas dan kriteria sebagai acuan kegiatan tata kelola keuangan desa.¹³

Ro'is AlFauzi:
Pertanggungjawaban Atas Prioritas Penggunaan Dana Desa di Daerah Tertinggal di Tengah Pandemi Covid 19

Terdapat asas tentang pengelolaan keuangan desa, bahwa dalam pengelolaan keuangan desa didasarkan dengan praktik praktik asas pemerintahan yang baik, asas asas tersebut tercantum dalam Permandagri No 113 Tahun 2014 ialah transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan sangat disiplin anggaran, adapun disiplin anggaran yang perlu diperhatikan didalam mengelola keuangan desa diantaranya:

1. Pendapatan yang telah direncanakan ialah tentang perkiraan yang terukur secara rasional yang bisa dicapai bagi setiap sumber pendapatan. Sedangkan belanja yang telah dianggarkan ialah batasan tertinggi pengeluaran belanja.
2. Pengeluaran wajib didukung dengan kepastian tersedianya oleh penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak pernah dibenarkan untuk melaksanakan kegiatan yang belum pernah tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBDesa atau perubahan APBDesa.
3. Dari semua pengeluaran dan penerimaan daerah didalam tahun anggaran yang telah bersangkutan harus dimasukkan dalam APBDesa dan akan dilakukan melalui rekening kas desa.

D. Tanggu Jawab Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa dan Dana Desa Ditengah Pandemi

Tanggung jawab ialah suatu keadaan yang wajib menanggung segala sesuatu, jadi bertanggungjawab adalah wajib menanggung, menanggung segala sesuatu dan atau memberi jawana mengetahui jawaban dan menanggung akibatnya. Guna mengetahui siapa yang akan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan tugas tugas dari pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat, terlebih dahulu maka perlu dikemukakan mengenai jabatan pemerintahan yang dilekati oleh fungsi dan kewenangan pemerintah.

Untuk dapat mengetahui terhadap siapa yang akan bertanggungjawab secara yuridis harus dilihat dari segi sumbernya dan lahirnya wewenang hal itu sesuai dengan konsep hukum *“geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid”* atau *there no authority without responsibility*. Didalam setiap dalam pemberian

*Ro'is AlFauzi:
Pertanggungjawaban Atas Prioritas Penggunaan Dana Desa di Daerah
Tertinggal di Tengah Pandemi Covid 19*

wewenang kepada pejabat pemerintah yang tertentu tersirat pertanggungjawaban dari pejabat yang telah bersangkutan dalam pertanggungjawaban.¹⁴

Mandat sumbernya dari persoalan wewenang, karena dalam setiap wewenang tetap berada pada mandans atau pemberi wewenang sedangkan mengenai mandataris hanya dilimpahi soal wewenang bertindak untuk dan atas nama mandans. Terhadap mandans tidak adanya penyerahan wewenang dalam artian mandans akan tetap dapat bertindak sendiri atas namanya. Tidak adanya sebuah penyerahan wewenang pada mandat, maka yang harus bertanggung jawab secara yuridis tetap pada mandans.

Didalam atribusi wewenang dalam pertanggungjawaban secara yuridis oleh penerima wewenang, hal ini tergantung pada si penerima wewenang yang melakukan mandat/delegasi, jika akan yang dilakukan adalah tentang pemberian mandat kepada mandans maka tetap bertanggungjawab. Hal ini berbeda dengan tatacara delegasi dan maka memberi wewenang tidak akan bertanggungjawab, sehingga tanggungjawab akan dialihkan ke delegatoris.

Untuk dapat mengetahui tentang siapa yang akan bertanggungjawab didalam penyelenggaraan tugas tugas pemerintahan, kita harus mengacu pada pengertian pertanggungjawaban ensiklopedia keadministrasian publik, responsibiliti merupakan keseharusan seseorang guna melaksanakan selayaknya yang telah diwajibkan kepadanya . disebut pertanggungjawaban bahwasannya mengandung makna, walaupun setiap orang mempunyai kebebasan untuk melaksanakan suatu tugas yang telah dibebankan kepada mereka, akan tetapi tidak akan dapat membebaskan diri dari hasil atau sebuah akibat kebebasan perbuatannyadan maka ia bisa dapat dituntut melaksanakan secara layak apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹⁵ Pertanggung jawaban pejabat pemerintahan dalam makna ini bahwa beban tanggung jawab tetap akan dapat ditujukan kpada setiap subjek hukum yang telah melanggar suatu hukum, tidak peduli apakah subjek hukum ituseorang sebagai pemerintah maupun pribadi.

Hubungan kewenangan dan pertanggungjawaban tersebut perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan negara sehingga terdapat kejelasan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan negara, terutama dalam rangka

*Ro'is AlFauzi:
Pertanggungjawaban Atas Prioritas Penggunaan Dana Desa di Daerah
Tertinggal di Tengah Pandemi Covid 19*

pelaksanaan kewenangan otorisasi dan ordonasi. Tanggung Jawab pejabat dalam pelaksanaan fungsi tersebut akan dibedakan antara tanggungjawab pribadi dan jabatan.

Berpedoman pada ketentuan hukum, pejabat hanya menjalankan fungsi dan wewenangnya, sebab pejabat tersebut tidak memiliki wewenang, yang dilekati wewenang adalah jabatan. Logeman berpendapat yakni berdasarkan hukum tata negara, jabatan dibebani dengan kewajiban diberi wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, kewajiban dan hak berjalan dinamis tidak peduli dengan adanya pergantian jabatan. Tanggungjawab jabatan tersebut juga berkenaan dengan soal keabsahan tindakan sebuah hukum pemerintah yang dilakukan pejabat atas nama jabatan atau *ambtshalve*.¹⁶

Soal tanggung jawab akan dapat tertuju pada seorang pejabat pemerintahan yang melaksanakan mengenai urusan pemerintahan yang melakukan tindakan diskresi sesuai prinsip "*deen Bevoegheid zonder verantwoordenlijkheid*" yaitu tidak ada sebuah kewenangan tanpa pertanggungjawaban maka disetiap pengguna wewenang oleh pejabat selalu disertai dengan tanggung jawab.¹⁷ Wewenang tersebut telah melekat dalam sebuah jabatan, tapi didalam penerapannya akan dijalankan oleh manusia sebagai dari wakil atau fungsional jabatan, jadi siapa yang wajib memikul tanggungjawab hukum ketika akan terjadi suatu penyimpangan, maka dilihat secara kasuistik sebab tanggungjawab bisa berupa tanggung jawab jabatan dan dapat pula tanggung gugat secara pribadi.

Berkaitan dengan adanya mal administrasi di dalam menggunakan wewenang ataupun publik servis/tanggung jawab secara pribadi. Pejabat akan melaksanakan tugas dan kewenangan jabatannya atau membuat suatu kebijakan yang akan dibebankan tanggung jawab pribadi jika ia telah melakukan tindakan mal administrasi. F. r Bothlink mengemukakan bahwa seorang pejabat atau seorang wakil bertanggung jawab sepenuhnya ketika ia menyalahgunakan situasi kondisi dengan tindakan amoralnya pribadi terhadap kepentingan dari pihak ketiga, dan bilamana ia telah bertindak moral tercela atau dengan I'tikad sangat buruk dan ceroboh, yakni melakukan suatu tindakan mal administrasi.¹⁸

Ro'is AlFauzi:
Pertanggungjawaban Atas Prioritas Penggunaan Dana Desa di Daerah
Tertinggal di Tengah Pandemi Covid 19

Kegagalan pejabat pemerintah berwenang dalam bertindak adalah salah satu bentuk perbuatan maladministrasi. Perbuatan tersebut berupa suap, berburuk sangka, gratifikasi, penundaan berlarut dan lainnya. Menurut Tatik Sri Djatmiati dalam sebuah konteks hukum administrasi, ada lingkup mal administrasi tidak semata mata akan terjadi perilaku penyimpangan, namun pengertian luasnya dapat terjadi karena sebuah ide yang tidak benar/ tidak bagus atau pertimbangan secara non rasional, *irrational manners*.¹⁹ Ini berkaitan dengan kemampuan dan kecakapan para pejabat yang berwenang dalam penilaian rasionalitas tindakan dari pemerintah maupun dalam membuat keputusan.

Dalam menanggung tanggung jawab, pemerintah pusat dan daerah secara prinsip selalu memperhatikan pedoman asas pemerintahan yang baik. Pemerintah daerah yang membawahi Pemerintahan desa selalu memberikan pedoman soal tanggung jawab kewenangan jabatan, jika dilihat dari segi jabatan pemerintah desa merupakan jabatan pemerintahan tingkatan bawah yang selalu menjadi polemik soal urusan pengucuran dana, sehingga dalam pengelolaan dana tidak lain pasti terkait mengenai dana bantuan. Meny soal keuangan negara, negara menyesuaikan dengan prinsip good governance yang menjadi sebuah bingkai dalam penyelenggaraan kesejahteraan rakyat didalam negara kesejahteraan. Tapi dalam pembaruan visi dan suatu sistemkelola keuangan negara akan dapat berhasil; apabila ditempatkan dibagian integral dari refrmasi sistem dan kultur dari birokrasi pemerintahan yang secara menyeluruh.²⁰

Pengelolaan uang negara mengandung sebuah unsur perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggung jawaban. Hal ini didasari oleh pengelolaan uang dan keuangan desa, dana desa merupakan hal penting dari pengelolaan keuangan negara. Pertanggung jawaban dalam keuangan negara dilihat dalam arti yang luas maksudnya pertanggungjawaban akan dilakukan oleh pemerintah adalah tanggung jawab keuangan negara meliputi APBN, APBD, dan Unit Usaha Negara, pada hakikatnya inimerupakan seluruh kekayaan yang dimiliki negara. Tanggung jawab dalam keuangan desa ada ditangan kepala desa selaku pemegang kekuasaan teta kelola keuangan desa sebagaimana hal tersebut diatur peraturan pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU

*Ro'is AlFauzi:
Pertanggungjawaban Atas Prioritas Penggunaan Dana Desa di Daerah
Tertinggal di Tengah Pandemi Covid 19*

Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dalam hal pelaporan dan pertanggungjawaban pasal 103 yaitu :²¹

1. Kepala desa akan menyampikan sebuah laporan realisasi tentang pelaksanaan APBDesa ke Bupati atau walikota disetiap semester tahun yang berjalan. 2) laporan tersebut sebagaimana dimaksudkan ayat 1 untuk semester pertama yang disampaikan paling lambat ada akhir bulan juli tahun berjalan. 3) laporan dimaksudkan pada ayat 1 untuk semester yang kedua akan disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari bulan setelahnya
2. Dalam pengaturan pengelolaan uang desa di Indonesia merupakan sebuah implementasi dari suatu asas yaitu asas negara hukum, asas legalitas dan kepastian hukum. Oleh karena itu salah satu untuk mewujudkan sebuah transparansi dan keakuntabilitas pengelolaan keuangan desa yaitu dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban atas keuangan tersebut.

Dampak dari bencana alam dan non alam yang disebut dengan *Covid 19* yang dialami seluruh masyarakat dunia baru-baru ini mengakibatkan putusnya hubungan kerja ke segala sektor usaha hingga pekerja. Penanganan suatu bencana mengacu UU No 24 Tahun 2007 yaitu menitik beratkan di partisipasi masyarakat dalam menangani penanggulangan bencana, menurut Gunawan, adapun unsur dalam menanggungi bencana alam yaitu dikelompokkan kedalam tiga varian besaran yakni: 1) publik sektor, 2) privat sektor, 3) kolektif sektor. Ketiga sektor tersebut menyatu dapat merupakan kekuatan besar guna menghadapi dari berbagai masalah termasuk penanggulangan bencana alam. Dengan pembangunan persamaan persepsi adalah langkah pertama untuk mengantisipasi sebuah timbulnya kekaburan peranan atau konflik yang menjadi kepentingan kalangan masyarakat, keluarga, seorang tokoh masyarakat dan aparat pemerintahan desa. Adapun tentang persamaan persepsi dalam sektor publik, sektor privat dan sektor kolektif merupakan langkah awal guna membangun antara kesepahaman dan kesepakatan .²²

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana akan dilakukan pada tahapan pra bencana, disaat tanggap darurat dan setelah bencana karena masing masing tahapan mempunyai model karakteristik dengan penanganan yang

*Ro'is AlFauzi:
Pertanggungjawaban Atas Prioritas Penggunaan Dana Desa di Daerah
Tertinggal di Tengah Pandemi Covid 19*

berbeda, pemerintahan desa membawa beban tanggungjawab bagi masyarakat ditengah pandemi yang dialami sekarang dengan mengikuti protokol dari pemerintah berdasarkan peraturan menteri desa seperti halnya penguatan dan memfasilitasi masyarakat desa didalam kesiapsiagaan untuk menghadapi tanggap bencana dan juga kejadian luar biasa yang lain yaitu:²³

1. Menyediakan layanan informasi tentang adanya bencana
2. Memberikan adanya pelatihan tentang pencegahan dan penanganan pada penyakit menular atau pandemi misalnya pelatihan diri APD, membuat hand sanitizer, disinfektan dll.
3. Memberikan kepelatihan tentang adanya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
4. Memberikan kepelatihan tentang tenaga sukarelawan guna penanganan bencana.
5. Memberikan kepelatihan tentang pengenalan potensi bencana dan mitigasi.
6. Adanya sebuah penguatan dalam kesiapsiagaan masyarakat lainnya sesuai dengan kewenangan desa yang telah diputuskan dalam musyawarah desa.

Pada saat terjadi tanggap darurat, kegiatan-kegiatan tentang penanggulangan bencana selain didukung oleh dana APBD juga tersedia dana yang siap pakai seperti dana desa yang pertanggungjawabannya melalui mekanisme khusus. Pengawasan pada seluruh kegiatan dalam penanggulangan bencana dilakukan oleh kalangan pemerintah, daerah dan masyarakat , masyarakat dari golongan desa tertinggal agar tidak menyimpang dalam penggunaan dana maka harus memperhatikan betul terhadap mekanisme tersebut. pemerintah sebenarnya telah mendapat penerimaan bantuan dana baik saat pra bencana, tanggap darurat ataupun pasca bencana, akan tetapi mereka harus juga memperhatikan peraturan perundang undangan yang berlaku ketika menggunakannya. Berdasarkan pendapat diatas maka dalam penanganan bencana sangat dianjurkan adanya kerjasama antara stekholder dalam mewujudkan masyarakat dari kondisi bencana menuju kondisi normal.

Jika diamati seksama dalam penanganan bencana alam dan non alam kebanyakan pemerintah desa masih belum dapat mengacu dengan peraturan

Ro'is AlFauzi:
Pertanggungjawaban Atas Prioritas Penggunaan Dana Desa di Daerah Tertinggal di Tengah Pandemi Covid 19

terbaru. Padahal jika harus mengacu peraturan terdapat pernyataan Prioritas berdasarkan adanya pengawasan, dari prioritas tersebut dapat kita pahami bahwasannya dalam pengelolaan dana desa harus menerpakna sistem transparasi dana dan akuntabilitas, sehingga pemerintahan desa dan masyarakat harus bersama mengendalikan dana disetiap penggunaannya dengan syarat terjaga dalam pengawasan.

E. Prioritas Dana Desa di Daerah Tertinggal

Berdasarkan hasil dari kesepakatan musyawarah desa dalam membahas tahap penyusunan RKP desa dan kelengkapan data informasi yang akan dibutuhkan didalam menyusun RKP desa, maka adapun tata cara dalam penentuan prioritas penggunaan dana desa yaitu dilakukan dengan penilaian terhadap daftar kegiatan dari segi pembangunan dan atau pemberdayaan masyarakat, sebagai dari hasil kesepakatan dalam musyawarah desa yaitu diantaranya:²⁴

1. Prioritas Berdasarkan Segi Kemanfaatan; Dari segi dasarnya dalam penggunaan dana desa harus memberikan sebuah kemanfaatan yang sangat besar bagi masyarakat desa yaitu dengan memberikan prioritas kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang sifatnya mendesak untuk dilaksanakan. Adapun tolak ukur dalam memberikan manfaat penggunaan dana yakni meliputi 1) kegiatan yang didalamnya memberikan kemudahan kepada masyarakat memperoleh layanan kesehatan, 2) mengembangkan mulai dari kapasitas dan kapabilitas masyarakat dimuali dari anak anak, remaja, pemuda hingga orang dewasa, 3) mengembangkan usaha ekonomi yang produktif, 4) memberikan pelestarian dalam lingkungan hidup dan penanggulangan bencana alam., didalam mengatasi bencana alam dan non alam maka pemerintah harus dapat menimbang kebutuhan dana sesuai kebutuhan prioritasnya
2. Prioritas Berdasarkan Segi Partisipasi Masyarakat; Di dalam penggunaan dana desa, pemerintah desa mengelola sesuai mekanisme pembangunan yang partisipatif dengan tumpuan peran aktif masyarakat desa dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan segi pengawasan, maka kegiatan tersebut dapat

dinilai dari, 1) kegiatan yang didukung oleh sebagian besar masyarakat desa lebih diutamakan, 2) kegiatan yang direncanakan dan dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa bersama masyarakat desa, 3) kegiatan yang mudah diawasi pelaksanaannya oleh masyarakat desa lebih diutamakan. Ditengah pandemi bencana non alam yang dialami seluruh elemen masyarakat sekarang ini, tidak bisa dikendalikan oleh perorangan dalam melaksanakan kegiatan, semua kegiatan harus didukung mulai dari masyarakat hingga perangkat dusun dan desa. masalah pandemi dibuatkan gugus tugas hingga kordinator gugus tersebut guna memudahkan masyarakat dalam mengevaluasi dan bersosialisasi pencegahan penularan bencana non alam atau yang disebut virus Covid 19.

3. Prioritas Berdasarkan Segi Swakelola dan Pendayaan Sumberdaya Desa; Kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa telah dibiayai oleh dana desa dari pemerintah dan akan diarahkan untuk menjadikan dana tersebut tetap selalu berputar di desa. Pemutaran dana dapat diserupakan pengembangan usaha desa seperti BUMDES dan usaha kreatif masyarakat perdukuan dengan dukungan dana desa. Dengan berputarnya dana tersebut pemerintah desa di harapkan dapat memenuhi kebutuhan pembangunan dan pengembangan desa dengan segala tanggungjawab sebagai pemegang jabatan pemerintahan desa.
4. Prioritas Berdasarkan dari Segi Berkelanjutan; Tujuan pembangunan desa akan sangat mudah dicapai ketika kegiatan pembangunan atau pemberdayaan dibiayai dana desa. Dalam segi berkelanjutan ini sekiranya pemerintah juga harus membagi dana desa sebagai pengelolaan jangka panjang dan sebagai penanganan bencana non alam yang telah dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Prioritas ini juga memberikan tujuan untuk memastikan mengenai sarana prasaranadan kegiatan yang telah dibiayai dana desa dan harus berkelanjutan dalam pengelolaannya, pemanfatannya dan pemberdayaannya. Jika pemerintah dapat membagi dana tersebut sebagai sistem berkelanjutan maka dana desa yang satu tahun sekali turun akan menghasilkan manfaat bagi seluruh elemen masyarakat di daerah tertinggal.

5. Prioritas Berdasarkan dari Segi Prakarsa Inovasi Desa; Dalam mengembangkan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa tertinggal, inovasi inovasi dari pihak pemerintah desa yang didukung oleh masyarakat dapat meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat, kemiskinan, penanggulangan bencana alam dan non alam, sehingga penggunaan dana tersebut dapat terkontrol dengan konkrit.
6. Prioritas Berdasarkan dari Segi Adanya Pengawasan; Dana desa sebagai pembiayaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, dalam pengelolaannya sifatnya transparan dan akuntabel. Dalam penggunaan dana tersebut, masyarakat harus mempunyai andil yang besar untuk mengawasi penggunaannya, maka dari itu kegiatan yang telah dibiayai oleh dana desa harus segera dipublikasikan kepada masyarakat diruang publik ataupun ruang yang dapat diakses semua kalangan masyarakat desa. Dana desa merupakan bagian sensitif jadi dalam pengelolaannya harus diketahui secara menyeluruh oleh masyarakat dan aparat desa karena dana ini sebuah vital utama dalam melakukan peningkatan upaya pembangunan fisik dan pemberdayaan, dan hal yang terbaru kali ini yaitu sebagai penanganan bencana dan bencana non alam.
7. Prioritas Berdasarkan dari Segi Pengembangan Kegiatan di Luar Prioritas Penggunaan Dana Desa

Dana desa telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 pasal 9 ayat 2 yang bersifat wajib maka prasyarat penggunaan dana desa diluar kegiatan yang telah diprioritaskan dapat dilakukan oleh Bupati atau Walikota yang menjamin bahwa seluruh kegiatan segi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang akan dibutuhkan masyarakat desa telah mampu dipenuhi keseluruhan oleh desa, misalnya pembangunan kantor desa bagi desa yang belum memiliki kantor luas, pembangunan balai dusun bagi dusun yang belum mempunyai kantor untuk kegiatan masyarakat per dusun dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan kepentingan desa.²⁵

Prioritas dana desadidas merupakan prioritas yang ditetapkan pemerintah dan Kemendes pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi sebagai regulasi

Ro'is AlFauzi:
Pertanggungjawaban Atas Prioritas Penggunaan Dana Desa di Daerah Tertinggal di Tengah Pandemi Covid 19

yang berlaku sah dan sebagai pedoman dalam pembagian dan pengelolaan dana desa di daerah tertinggal, sangat tertinggal, berkembang bahkan desa maju. Dengan ke tujuh prioritas diatas diharapkan dapat membawa perkembangan yang sangat pesat kepada setiap daerah, sehingga per-daerah lambat laun akan dapat meningkat dari segi ekonomi, pembangunan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakatnya.

III. PENUTUP

Tanggung jawab pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa ditengah pandemi virus Covid 19 harus dapat dipertanggungjawabkan dengan acuan regulasi yang telah ditetapkan pemerintah seperti Undang undang No 6 Tahun 2014 dan Permendes Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas Permendes Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020.

Permendes telah diperbarui regulasinya dengan menambahkan peraturan yang lebih khusus yaitu penggunaan dana untuk penanganan pandemi Covid 19 yang diberupakan anatrailain, Bantuan Langsung Tunai (BLT), program keluarga harapan atau PKH, bantuan pangan non tunai atau BPNT dan kartu prakerja

Pemerintah juga harus sadar terhadap kewenangan yang telah dipangku dalam jabatannya seperti tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi sehingga pengelolaan dana di desa tertinggal dapat direalisasikan sesuai porsi dari segi prioritasnya dan dari segi pemerintahan yang baik.

Dalam segi pembagian prioritasnya terdapat tujuh prioritas yang harus dipenuhi yaitu prioritas dari segi kemanfaatan, partisipasi masyarakat, swakelola dan pendayagunaan sumberdaya desa, berkelanjutan, berdasarkan prakarsa dan inovasi desa, kepastian adanya pengawasa, pengembangan kegiatan diluar prioritas dari dana desa.

Ro'is AlFauzi:
Pertanggungjawaban Atas Prioritas Penggunaan Dana Desa di Daerah Tertinggal di Tengah Pandemi Covid 19

Catatan Akhir

¹UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 Ayat 1

²UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

³Dwi Hadya Jayani, Realisasi Dana Desa dalam APBN Per Januari 2015-2020, diakses dari <https://databooks.katadata.co.id/publish/2020/02/21/berapa-realisasi-penyyaluran-dana-desa-setiap-awal-tahun>, pada tanggal 14 Juni 2020

⁴ Muhammad Choirul Anwar, Dana Desa Mengucur Rp. 329,8 T, Masih ada 2000 Desa, diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191211184254-4-122333/dana-desa-ngucur-rp-3298-t-masih-ada-20000-desa-tertinggal>, pada tanggal 10 Juni 2010

⁵Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020

⁶Soeharyono Soemarwoto, *Catatan Penting ke-Indonesiaan Kita Jilid 2*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 72

⁷Philipus M. Hardjon, *Klasifikasi dan Identifikasi Cacat Yuridis Dalam Bidang Tata Usaha Negara, Bahan Ajar Hukum Administrasi*, (Surabaya: FH Universitas Airlangga, 2004). 7

⁸Agus Kasiyanto, *Tindak Pidana Korupsi Pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa*, (Jakarta: Deepublish, 2018), 142

⁹Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

¹⁰ Ick Rangga Bawono, *Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa*, (Jakarta: PT Grasindo, 2019). 123

¹¹Bintoro Wardiyanti dkk, *Percikan Pemikiran Tata Kelola dan Pembangunan Desa*, (Surabaya: Airlangga University, 2016), 31

¹²Zainal, "Dinamika Kebijakan Pemerintahan Desa Di Indonesia Dari Masa Ke Masa (Studi Tahun 1979 2015)", *Jurnal TAPIS*, Vol. 12, No. 1 Januari-Juni 2016.-Juni 2016. 22

¹³ BPKP. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, (Jakarta: Direktorat bpkp, 2015). 34

¹⁴Abdul Latif, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi: Ed 2*, (Jakarta: Permada Media Group, 2014). 54

¹⁵Muhammad Ikhwan, *Penerapan Asas Diskresi Dalam Pembuatan Keputusan Tata Usaha Negara*, diakses dari <https://studihukum.blogspot.co.id/2010/penerapan-asas-dalam-pembuatan-html>, pada tanggal 13 Juni 2020

¹⁶Teuku Saiful Bahri Johan, *Tata dan Hukum Administrasi Nefara dalam Tatanan Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018). 195

¹⁷Julista Mistamu, "Diskresi dan Tanggung jawab Administrasi Pemerintahan", *Jurnal Sasi*, Vol 17, 2011.6

¹⁸Teuku Saiful Bahri Johan, *Tata dan Hukum Administrasi Nefara dalam Tatanan Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*, 196

Ro'is AlFauzi:

Pertanggungjawaban Atas Prioritas Penggunaan Dana Desa di Daerah Tertinggal di Tengah Pandemi Covid 19

¹⁹Oheo Kimuddin Haris, *Tindak Pidana di Bidang Pertambangan*, (Surabaya Media Sahabat Cendikia, 2019), 317

²⁰Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta: Grasindo, 2018), 34

²¹Bintoro Wardiyanti dkk, *Percikan Pemikiran Tata Kelola dan Pembangunan Desa*, 164

²²Masrizal, *Pengendalian Masalah Sosial Melalui Kearifan Lokal*, (Banda Aceh: Syiah Kuala University, 2019). 49

²³ Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 BAB I huruf F Nomor 4

²⁴Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 BAB II huruf a ayat 3

²⁵Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 19 ayat 2

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, Muhammad Choirul, *Dana Desa Mengucur Rp. 329,8T, Masih Ada 20.000 Desa Tertinggal*
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20191211184254-4-122333/dana-des-a-ngucur-rp-3298-t-masih-ada-20000-desa-tertinggal>. diakses pada
 Pada 10 Juni tahun 2020

Bawono, Ick Rangga, *Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa*, Jakarta: PT Grasindo, 2019.

BPKP. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, Jakarta: Direktorat bpkp, 2015.

Haris, Oheo Kimuddin, *Tindak Pidana di Bidang Pertambangan*, Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2019.

Ikhwan, Muhammad. *Penerapan Asas Diskeris Dalam Pembuatan Keputusan Tata Usaha Negara*, <https://studihukum.blogspot.co.id/2010/penerapan-asas-dalam-pembuatan-html>, diakses pada tanggal 13 Juni Tahun 2020

Jayani, Dwi Hadya. *Realisasi Dana Desa dalam APBN Per Januari 2015- 2020*
<https://databooks.katadata.co.id/datapublish/2020/02/21/berapa-realisasi-penyaluran-dana-desa-setiap-awal-tahun>. diakses pada 14 Juni Tahun 2020

Johan, Teuku Saiful Bahri, *Hukum Tata dan Hukum Administrasi Nefara dalam Tatanan Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Kasiyanto, Agus, *Tindak Pidana Korupsi Pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa*, Jakarta: Deepublish, 2018.

Latif, Abdul, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi: Ed 2*, Jakarta: Permada Media Group, 2014.

Ro'is AlFauzi:
Pertanggungjawaban Atas Prioritas Penggunaan Dana Desa di Daerah Tertinggal di Tengah Pandemi Covid 19

- M.Hardjon, Philipus, *Klasifikasi dan Identifikasi Cacat Yuridis Dalam Bidang Tata Usaha Negara, Bahan Ajar Hukum Administrasi*, Surabaya: FH Universitas Airlangga, 2004.
- Masrizal, *Pengendalian Masalah Sosial Melalui Kearifan Lokal*, Banda Aceh: Syiah Kuala University, 2019.
- Mistamu, Julista. *Diskresi dan Tannggung jawab Administrasi Pemerintahan*, JurnalSasi, Vol 17, 2011.
- Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 BAB I huruf F Nomor 4
- Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 BAB II huruf a ayat 3
- Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 19 ayat 2
- Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Wardiyanti, Bintoro. Dkk. *Percikan Pemikiran Tata Kelola dan Pembangunan Desa*, Surabaya: Airlangga University, 2016.
- Soemarwoto, Soeharyono. *Catatan Penting ke-Indonesiaan Kita Jilid2*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Tjandra, Riawan. 2018. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Grasindo
- Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (1)
- Zainal. *Dinamika Kebijakan Pemerintah Desa Sdi Indonesia Dari Masa Ke Masa (Studi Tahun 1979-2015)*, Jurnal TAPIs, Vol. 12, No. 1 Januari-Juni 2016.-Juni 2016.